



## Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan mendatang

Juanda<sup>1</sup>, Octo Iskandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>1</sup>[Prof.juanda1963@gmail.com](mailto:Prof.juanda1963@gmail.com), <sup>2</sup>[Octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

**Info Artikel:**

Diterima:  
4 Januari 2024  
Disetujui:  
8 Januari 2024  
Dipublikasikan:  
15 Januari 2024

---

**ABSTRAK**

Pemilu 2024 di Indonesia akan mencatat sejarah sebagai pemilihan pertama yang secara bersamaan menentukan anggota legislatif, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, meskipun dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang berbeda. Proses demokrasi ini akan berlangsung di tengah partisipasi masyarakat yang tinggi, melibatkan berbagai fenomena sosiopolitik yang diungkapkan melalui gagasan dan perilaku yang bervariasi. Fenomena ini telah muncul sebelumnya pada Pemilu 2019 dan beberapa pemilihan sebelumnya dan sesudahnya, termasuk isu politisasi agama, ras, etnik, dan isu-isu non-elektoral lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-elektoral yang mungkin muncul sebelum dan/atau selama Pemilu 2024, yang dapat memicu konflik elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis fenomena sosiopolitik terkait Pemilu. Secara hipotetis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor non-elektoral (sosial, politik, budaya, keagamaan, ekonomi, dan hukum) memiliki potensi untuk meningkatkan eskalasi dan intensitas konflik selama Pemilu 2024, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pemilihan dan/atau meragukan legitimasi hasilnya.

---

**Kata Kunci:** Pemilu 2024, Faktor Non-Elektoral, Politisasi, Konflik

---

**ABSTRACT**

*The 2024 elections in Indonesia will mark a historic moment as the first simultaneous election to determine members of the legislature, president, vice president, regional heads, and deputy regional heads, even though they will be conducted on different dates and months. This democratic event will take place amid a strong surge in public participation, characterized by various sociopolitical phenomena expressed through diverse ideas and behaviors. Such phenomena have been evident in previous elections, including the 2019 elections, and others before and after, addressing issues such as the politicization of religion, race, ethnicity, and other non-electoral issues. This study aims to identify non-electoral factors that may emerge before and/or during the 2024 elections, potentially triggering electoral conflicts. The research utilizes a qualitative approach with data collection through literature review and analysis of sociopolitical phenomena related to elections. Hypothetically, the study's results suggest that several non-electoral factors (social, political, cultural, religious, economic, and legal) have the potential to escalate and intensify conflicts during the 2024 elections, ultimately disrupting the electoral process and/or casting doubt on the legitimacy of the results.*

*Keywords: 2024 Elections, Non-Electoral Factors, Politicization, Conflict*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Pada pertengahan Juni tahun 2022, tepatnya pada Rabu, 14 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan tahapan dan jadwal untuk Pemilu 2024. Beberapa hari sebelumnya, KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. PKPU ini menetapkan bahwa hari dan tanggal pemungutan serta penghitungan suara Pemilu 2024 adalah pada tanggal 14 Februari 2024,

sementara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dijadwalkan pada 27 November 2024. Keputusan waktu pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden diatur dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.

Pemilu 2024 mendatang memiliki signifikansi sebagai peristiwa elektoral yang sangat penting untuk dicermati. Hal ini bukan hanya karena momen tersebut menjadi catatan sejarah pertama dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia, di mana seluruh jabatan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan dipilih secara serentak dalam satu tahun yang sama. Pemilu 2024 juga dianggap sebagai panggung pertarungan, setidaknya bagi dua agenda sekaligus yang memiliki dampak besar bagi kebutuhan nasional. Pertama, menjaga integrasi dan keutuhan negara bangsa; kedua, memastikan bahwa demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah dapat terus dirawat dan dikembangkan.

Menjaga keutuhan dan kelangsungan negara bangsa merupakan keniscayaan, merupakan satu-satunya pilihan sejarah masa kini dan masa depan yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apa pun. Pada saat yang sama, fakta-fakta fenomenologis sosiopolitik yang menuju perpecahan, polarisasi, dan konflik sosial terus berlangsung pasca Pemilu 2019, dan kapan pun dapat mencapai titik ledakan yang dipicu oleh berbagai faktor penyebab.

Sambil berusaha menjaga keutuhan negara-bangsa, merawat demokrasi sebagai pilihan konsensus tentang bagaimana negara dan kekuasaan dikelola, yang telah dirintis dan dikonsolidasikan sejak Reformasi 1998, juga menjadi kebutuhan mendesak saat ini dan di masa depan yang tidak dapat ditawarkan lagi. Namun, pada saat yang sama, proses demokratisasi yang tengah berlangsung ini juga telah melahirkan berbagai distorsi dan paradoks yang seringkali menimbulkan kekhawatiran. Hal ini terjadi karena arus partisipasi dan kebebasan politik yang kuat juga diikuti oleh munculnya berbagai paradoks demokrasi, terutama sejak Pemilu 2019 dan pemilihan lainnya sebelum dan sesudahnya, dengan semakin kuatnya kecenderungan politisasi identitas. Dalam setiap kontestasi pemilihan, penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan memicu pertumbuhan infodemi yang sulit dikendalikan, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan lain sebagainya.

Studi ini bertujuan untuk memetakan setidaknya 4 (empat) isu sosiopolitik yang bersifat teknis atau non-elektoral, yang secara hipotetis memiliki potensi untuk memicu dan menimbulkan masalah, pada akhirnya menyebabkan konflik dalam kerangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, penggunaan politik identitas sebagai alat untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Kedua, fenomena polarisasi sosiopolitik yang berlanjut pasca Pemilu 2019 dan pemilihan sebelum dan sesudahnya. Ketiga, fenomena infodemi (wabah informasi) elektoral yang terakumulasi dari penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Keempat, keberadaan dan perilaku buzzer. Fokus penelitian ini adalah untuk mendiskusikan dan mencoba menjawab bagaimana keempat isu non-elektoral ini hadir sebelum dan/atau selama perhelatan pemilihan, yang berpotensi memicu konflik dalam Pemilu 2024 mendatang.

Berbagai perspektif tentang politik identitas dikemukakan oleh para analis politik kontemporer di Indonesia. Dimulai dengan definisi yang merujuk pada beberapa pakar, termasuk Agnes Haller dan Donald L. Morowitz. Seperti dikutip oleh Saputro (2018) dan Ardipandanto (2020), Haller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang berfokus pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Pandangan serupa diungkapkan oleh Donald L. Morowitz. Seperti yang dikutip oleh Habodin (2012), dalam pandangan Morowitz, politik identitas menjelaskan secara tegas siapa yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan dikesampingkan berdasarkan identitas tertentu dalam suatu aktivitas politik. Kemudian, karena batas pemisahan dan identifikasi tidak dapat diubah, status sebagai anggota atau bukan anggota kelompok berdasarkan identitas tersebut tampak bersifat permanen.

Perspektif Haller dan Morowitz memiliki benang merah yang sama, yaitu politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Dalam kerangka konseptual ini, politik identitas sebenarnya muncul sebagai bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk hubungan identitas primordial, khususnya etnis dan agama. Namun, dalam praktiknya, konsep politik identitas bertransformasi menjadi alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau mempertahankan status quo oleh aktor politik (Nasrudin, 2018; Habodin, 2012). Dengan narasi yang lebih tegas, Husni Mubarak (2018) bahkan mendefinisikan politik identitas sebagai upaya individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan dengan memanfaatkan kesamaan identitas tertentu dengan mayoritas pemilihnya.

Fenomena ini dapat ditemui dalam tulisan Aryojati Ardipandanto berjudul "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme" (2020). Dalam karya tersebut, Ardipandanto

membahas penggunaan politik identitas yang sering kali muncul dalam Pemilu 2019 oleh kedua Pasangan Calon (Paslon), baik Paslon nomor 1 maupun Paslon nomor 2, dengan pendekatan populisme yang berbasis agama, khususnya Islam.

Ardipandanto menyatakan bahwa populisme sebenarnya merupakan strategi umum yang dapat dimengerti dalam konteks upaya meraih kemenangan dalam pemilihan umum. Namun, hal ini menjadi berbahaya jika dilakukan secara berlebihan. Dalam konteks ini, Ardipandanto mencatat bahwa Paslon nomor 2 banyak menggunakan strategi populisme yang berbasis agama Islam. Narasi yang dibangun oleh mereka menggambarkan Paslon nomor 1 sebagai kelompok "tidak Islami" atau dengan kata lain, mendukung Paslon Nomor 1 dianggap sebagai dosa atau melanggar aturan agama, serta tidak mendukung kepentingan umat Islam.

Strategi populisme yang menggunakan politik identitas berbasis agama dalam konteks pemenangan pemilihan ini dianggap berisiko, karena tidak hanya bertentangan dengan kondisi alami masyarakat Indonesia yang beragam, tetapi juga mengabaikan esensi Pemilu sebagai ajang untuk berkompetisi ide serta memperkuat demokrasi. Dalam situasi ini, pendukung masing-masing kubu lebih cenderung terlibat dalam konflik horizontal yang dapat merusak kohesivitas sosial dan fondasi integrasi negara-bangsa, dibandingkan dengan fokus pada program dan visi para kandidat. Selain politik identitas, faktor non-elektoral lain yang berpotensi memicu konflik Pemilu adalah polarisasi politik. Secara umum, polarisasi politik didefinisikan sebagai perpecahan masyarakat menjadi dua kubu politik yang berlawanan secara diametral. Menurut J.Q. Wilson, faktor ini disebabkan oleh keterikatan kuat terhadap ideologi atau komitmen terhadap kandidat, sehingga memecah kelompok satu dengan kelompok lainnya (Annas dkk, 2019). Menurut Nolan McCarty, polarisasi juga dapat terjadi karena perbedaan dalam pendekatan terhadap isu-isu fundamental (Assyaukanie, 2022); atau karena adanya kebencian terhadap agama dan etnik dalam opini publik (Muhtadi, 2021), dan/atau meningkatnya klaim politik identitas (Tapsell, 2019).

Dalam konteks sejarah politik elektoral Indonesia, polarisasi politik yang tajam seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 masih dianggap sebagai isu yang relatif baru. Oleh karena itu, riset dan kajian mengenai isu ini masih terbatas dari para ahli. Dalam situasi ini, penulis menemukan beberapa tulisan yang relevan, salah satunya adalah tulisan Abdul Gaffar Karim berjudul "Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset" (2019). Dalam tulisannya, Karim mengingatkan bahwa polarisasi politik kemungkinan akan tetap hadir dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam dan luas akan sangat diperlukan, dengan harapan hasilnya dapat menjadi dasar akademis untuk mengelola polarisasi dengan tepat dan bijaksana, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Poin utama dari tulisan Karim terkait agenda riset mengenai polarisasi ini dapat disajikan sebagai berikut. Pertama, polarisasi politik dapat diidentifikasi dari dua perspektif: sebagai variabel yang dipengaruhi oleh politik elektoral, dan sebagai pengelolaan polarisasi sosial di masyarakat melalui politik elektoral, baik untuk meredamnya maupun untuk memudahkan mobilisasi massa. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mendalami pemahaman mengenai polarisasi politik di Indonesia.

Faktor non-elektoral lain yang berpotensi memicu konflik dalam Pemilu 2024 adalah isu Infodemi Elektoral. Konsep Infodemi diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) dan telah menjadi populer sejak merebaknya wabah Covid-19 di seluruh dunia. Istilah Infodemi berasal dari penggabungan kata "information" dan "pandemic". WHO menjelaskan bahwa Infodemi merujuk pada jumlah informasi yang beredar secara berlebihan, termasuk informasi yang salah dan menyesatkan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, selama masa pandemi Covid-19 (World Health Organization, 2022).

Dengan penjelasan yang lebih rinci, Hermin Indah Wahyuni (2020) menyatakan bahwa infodemi adalah situasi di mana informasi menyebar dengan cepat dalam jumlah yang sangat besar, dengan tingkat akurasi yang tidak jelas, rendah, dan sulit dipercayai. Ia menyamakan kondisi ini dengan pandemi, dan biasanya muncul dalam situasi sosial yang penuh ketidakpastian, seperti pada masa pandemik. Bahaya utamanya adalah dalam situasi demikian, kelebihan informasi juga seringkali disertai dengan kondisi keambiguan, di mana semua informasi dianggap memiliki tingkat kebenaran yang sama (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan pemaknaan WHO dan penjelasan yang dikemukakan oleh Wahyuni, "Pandemi Informasi" sebenarnya telah dan secara hipotetis dapat terus berlanjut, mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan perspektif ini, istilah "Infodemi Elektoral" digunakan untuk menggambarkan penyebaran informasi yang melimpah terkait pemilihan umum, dengan tingkat akurasi yang rendah.

Dalam konteks ini, berbagai bentuk berita palsu (hoax), kampanye hitam (black campaign), dan ujaran kebencian (hate speech) dapat menemukan ruang artikulasi.

Berdasarkan hasil telaah literatur, banyak ahli yang telah mengkaji isu infodemi ini. Namun, sebagian besar penelitian fokus pada konteks di luar perhelatan elektoral. Perhatian terhadap isu infodemi lebih sering dikaitkan dengan fenomena pandemi Covid-19 dan/atau literasi digital. Sebagai contoh, dalam tulisan Rachmad Gustomy berjudul "Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter" (JIIP, 2020), dibahas bagaimana infodemi, terutama yang berkembang di platform Twitter, terkait Covid-19 telah menyebabkan polarisasi politik dalam masyarakat, terbagi menjadi dua kutub: kluster populis pluralis dan kluster populis Islam. Kedua kutub politik ini berselisih dalam merespon dan menghadapi kebijakan pemerintah terkait Covid-19, saling bertengkar di ruang publik. Ironisnya, pertikaian antara dua kutub yang didominasi buzzer ini mengesampingkan suara kelompok kritis dan rasional.

Faktor non-elektoral terakhir yang mungkin memicu konflik dalam Pemilu 2024 adalah peran dan perilaku buzzer politik. Pada awalnya, istilah "buzzer" lebih dikenal dalam dunia bisnis, terutama di bidang pemasaran ekonomi. Buzzer digunakan sebagai teknik pemasaran yang mengandalkan penyebaran informasi melalui mulut ke mulut untuk meningkatkan bisnis (Mustika, 2019). Seiring dengan perkembangan media sosial, istilah buzzer menjadi populer dan berkembang pesat. Buzzer tidak hanya berfungsi sebagai pengguna media sosial yang mengunggah konten, tetapi juga sebagai pelaksana kampanye dalam buzz marketing.

Dari konsep dasar ini, penggunaan buzzer media sosial awalnya dimaksudkan untuk melawan kampanye hitam terhadap seorang kandidat dan secara bersamaan memperbaiki citra positifnya di mata publik, dengan dampak positif pada dukungan elektoral (CIPG, 2019). Dalam konteks kepentingan politik elektoral, peran buzzer dianggap positif karena membantu membangun opini positif mengenai kandidat, mencegah penyebaran fitnah dari pesaingnya (Mustika, 2019; Syahputra, 2017).

Namun, dalam perkembangan politik dan demokrasi elektoral Indonesia belakangan ini, peran buzzer mengalami pergeseran fungsi yang signifikan. Kini, buzzer cenderung menjadi alat para peserta kontestasi untuk menjalankan berbagai strategi kampanye hitam atau kampanye negatif tanpa dasar bukti otentik dan argumen yang kuat. Selain itu, mereka juga sering terlibat dalam penyebaran hoax dan/atau ujaran kebencian dengan tujuan menjatuhkan lawan politik, bukan untuk membangun citra positif kandidat yang mereka dukung.

Banyak ahli dan pengamat pemilihan di Indonesia telah melakukan banyak penelitian mengenai peran dan perilaku buzzer dalam aktivitas politik, terutama dalam konteks pemilihan umum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Salah satu studi yang relevan adalah tulisan Christiany Juditha yang berjudul "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia"

(2019). Dalam penelitian Juditha, terungkap bahwa buzzer seringkali menjadi penyebar kampanye hitam tentang lawan politik dari kandidat yang mereka dukung dalam pemilihan umum dan pilkada. Taktik kampanye hitam semacam itu membuat buzzer terlibat dalam penyebaran hoax, ujaran kebencian, bahkan fitnah yang berpotensi merugikan. Hal ini kontras dengan peran ideal buzzer yang seharusnya difokuskan pada membangun citra positif untuk kandidat yang didukung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian terkait yang telah diuraikan sebelumnya, riset ini merupakan studi yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor non-teknis dalam pemilihan yang dapat mempengaruhi munculnya konflik. Dalam konteks ini, ruang lingkup penelitian mencakup isu-isu krusial yang terkait dengan pemilihan, yaitu penggunaan politik identitas, polarisasi sosiopolitik, infodemi pemilihan, serta peran dan perilaku buzzer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan analisis literatur yang sepenuhnya berdasarkan pada sumber data sekunder, termasuk dokumen-dokumen tertulis seperti buku, regulasi perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta artikel dan opini yang terdapat dalam media massa baik dalam bentuk digital maupun cetak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki ruang lingkup yang luas dan keterkaitan fenomenologis yang multidimensi di antara isu-isu, data/informasi, fakta, dan peristiwa empirisnya. Keputusan untuk menggunakan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada konteks isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dianggap lebih sesuai dan kompatibel untuk

mengeksplorasi dan memetakan secara kritis, sistematis, dan komprehensif berbagai isu non-elektoral yang dapat menimbulkan problematika serius dan memicu terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan isu-isu utama dan ruang lingkup penelitian dapat dieksplorasi, dipahami, dan dipetakan secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif. Seperti yang dinyatakan oleh Devine, pendekatan kualitatif memiliki keunggulan, antara lain, kemampuan untuk secara leluasa mengeksplorasi keyakinan, pandangan, dan sikap narasumber, serta dapat menjelaskan pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana," bukan hanya "apa" (Harrison, 2016).

Berdasarkan jenis studi yang dilakukan, yaitu studi kepustakaan, data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dan dieksplorasi melalui teknik dokumen. Kajian ini memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber sekunder, seperti literatur ilmiah sebagai dasar teoritis, analisis perspektif, serta data dari peraturan perundangan yang relevan, dokumentasi pemberitaan, fakta-fakta fenomenologis yang berkembang di ruang publik, dan pandangan dari berbagai pihak (pelaku peristiwa, pengamat, dan ahli) yang diperoleh dari berbagai media massa, baik cetak maupun digital.

Untuk menanggulangi perbedaan dan ketidak konsistenan pada data atau informasi yang bersifat meluas, bahkan kontradiktif dari sumber sekunder, peneliti menggunakan teknik triangulasi seperlunya. Triangulasi menjadi penting untuk memberikan keyakinan kepada peneliti dalam memilih data atau informasi yang valid untuk analisis dan kesimpulan penelitian.

Terkait analisis data, sesuai dengan pendekatan kualitatif, analisis data dalam studi ini dilakukan secara simultan dengan tahapan pengumpulan data. Dalam hal ini, analisis dilakukan pada setiap fase pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2008), analisis dimulai pada fase pengumpulan berbagai data sekunder. Fase berikutnya melibatkan penentuan fokus isu sentral kajian melalui teknik analisis taksonomi (pengkategorian isu-isu yang relevan). Fase terakhir melibatkan analisis komponensial (pemahaman bagian-bagian dari setiap isu pembahasan). Dengan mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui serangkaian proses, termasuk reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengujian (verification).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Identitas, Alat Pemenangan Kontestasi**

Politik Identitas merujuk pada peran identitas sosial, seperti suku, agama, gender, orientasi seksual, dan lainnya, dalam ranah politik. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok ini membentuk identitas politik berdasarkan ciri-ciri tersebut. Para politisi dan partai sering kali berupaya memobilisasi dukungan berdasarkan identitas ini, mengaitkan kepentingan kelompok tertentu dengan platform atau agenda politik mereka.

Contoh politik identitas melibatkan strategi politik yang didasarkan pada kelompok etnis tertentu, seperti memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas atau menggunakan narasi identitas tertentu untuk memenangkan dukungan. Seringkali, politik identitas dapat menjadi faktor yang signifikan dalam kampanye pemilihan dan membentuk cara pemilih mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik.

### **Alat Pemenangan Kontestasi:**

Alat Pemenangan Kontestasi merujuk pada berbagai strategi, taktik, dan sumber daya yang digunakan oleh kandidat, partai politik, atau kelompok politik untuk memenangkan pemilihan atau kontestasi politik. Alat pemenangan ini dapat bervariasi dari kampanye iklan, kegiatan door-to-door, penggunaan media sosial, debat, hingga mobilisasi pemilih dan pendanaan kampanye.

Beberapa alat pemenangan yang umum digunakan melibatkan penggunaan media massa untuk menyampaikan pesan kampanye, polling dan penelitian untuk memahami keinginan pemilih, dan kampanye pintu ke pintu untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Penting untuk dicatat bahwa teknologi dan strategi dalam alat pemenangan terus berkembang seiring waktu, mencerminkan perubahan dalam perilaku pemilih dan tren politik.

Kombinasi efektif dari politik identitas dan alat pemenangan dapat memainkan peran besar dalam menentukan hasil suatu kontestasi politik, dengan memperhitungkan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi preferensi pemilih dan bagaimana alat pemenangan digunakan untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan.

Isu politik identitas dalam konteks perhelatan elektoral di Indonesia muncul dan mendapat perhatian serius sejak Pemilu 2014, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada Pilkada DKI 2017. Awalnya, fenomena ini dimulai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Ahok ketika menyentuh Al-Quran Surat Al-Maidah 51, yang memicu reaksi umat Islam, terutama di Jakarta ([www.metro.tempo.co](http://www.metro.tempo.co), 26 Desember 2017). Reaksi ini diikuti oleh demonstrasi 411 (4 November 2016) di depan Istana, dihadiri oleh sekitar 200 ribu orang, hanya tiga bulan sebelum pencoblosan. Demonstrasi lebih besar, yaitu Aksi Damai 212, digelar pada 2 Desember 2016 dengan tuntutan untuk menonaktifkan Ahok sebagai gubernur setelah dijadikan tersangka kasus penodaan agama. Narasi ini berkembang hingga mencakup Presiden Jokowi.

Selain dari aksi-aksi tersebut, peningkatan tajam penggunaan politik identitas dalam Pilkada DKI 2017 juga terlihat dari pertengkaran antara massa pendukung Anies dan Ahok di berbagai platform media sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contoh yang sangat kontroversial adalah tersebarnya spanduk dengan narasi "larangan menyolatkan jenazah para pendukung Ahok" ([www.metro.tempo.co](http://www.metro.tempo.co), 25 Februari 2017). Dalam konteks elektoral, isu politik identitas pada Pilkada DKI 2017 menjadi sisa yang kemudian kembali muncul dengan ketegangan yang tak kalah kuat pada Pemilu serentak 2019. Identitas primordial, terutama agama dan etnis, menjadi titik fokus pada ketiga perhelatan elektoral tersebut.

Politik identitas, yang seharusnya muncul sebagai kesadaran individu untuk menggali identitas partikular (khas) dalam relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama, di praktiknya mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan status quo oleh aktor politik. Saat digunakan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi kekuasaan, politik identitas diperlakukan secara kasar tanpa memperhatikan dampak sosiopolitik yang mungkin timbul. Fenomena ini terlihat jelas dalam Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 lalu.

Dalam kasus Pilkada DKI 2017, politik identitas termanifestasi melalui berbagai bentuk ekspresi dan artikulasi. Semua bentuk ini berkaitan dengan identitas dua aspek primordial, yaitu agama dan etnis, yang melekat pada figur calon gubernur, terutama Basuki Tjahya Purnama (Ahok yang Kristen dan beretnik Tionghoa) dan Anies Rasyid Baswedan (Anies, Muslim dan beretnik Arab). Keduanya mewakili dua kutub identitas yang tidak hanya berbeda tetapi juga saling berhadapan dalam situasi kontestatif.

Dalam situasi kontestatif tersebut, kubu Anies "mengambil keuntungan" dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang mungkin awalnya tidak disengaja untuk menistakan agama Islam, namun berkembang menjadi kasus penistaan agama yang memicu aksi besar oleh kelompok umat Islam Jakarta yang dikenal dengan Kelompok 212. Kubu Anies memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan mobilisasi pemilih guna meraih kemenangan dalam Pilkada.

Dan akhirnya, terbukti bahwa Anies, yang pada saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, berhasil memenangi Pilkada pada putaran kedua. Fenomena politik identitas dalam Pilkada

2017, yang telah menimbulkan problematika kebangsaan karena dampak daya sebar yang sangat luas, kembali terjadi menjelang dan sepanjang perhelatan Pemilu 2019. Namun, berbeda dengan Pilkada DKI, gejala politik identitas dalam Pemilu 2019 tidak secara langsung menghadapkan dua identitas primordial yang berbeda. Dalam kasus Pilkada DKI, politik identitas lebih terfokus pada pengidentifikasian dan stigmatisasi oleh masing-masing kubu terhadap lawannya.

Pada saat itu, kubu Jokowi-Ma'ruf didistigmatisasi dengan berbagai identitas buatan yang terus digunakan tanpa henti, bahkan setelah Pemilu 2019 berakhir. Mulai dari Jokowi keturunan PKI, antek asing, anti atau phobia Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT, dan sebagainya. Sementara itu, kubu Prabowo-Sandiaga diberikan berbagai tuduhan stigmatis, seperti Prabowo sebagai ultra-nasionalis, Prabowo Natalan, pendukung Islam radikal dan khilafah, dan sebagainya (Factsheet Politik Identitas, Puskapol UI, 2020). Semua isu yang dilekatkan oleh masing-masing kubu kepada lawan dan pendukungnya merupakan isu-isu non-elektoral yang tidak berhubungan langsung dengan aspek teknis pemilihan.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan model propaganda Rusia dengan strategi firehose of falsehood, yaitu menyebarkan kebohongan dalam kampanye untuk memengaruhi pemilih. Kubu Jokowi-Ma'ruf juga menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan strategi politik of fear (politik ketakutan) dalam kampanye (Factsheet

Politik Identitas, Puskapol UI, 2020). Di sisi lain, kubu Prabowo-Sandiaga menuduh kubu

Jokowi-Ma'ruf menerapkan strategi playing victim terkait isu identitas, sementara mereka sendiri kemudian terlibat dalam politik identitas dengan memilih seorang Kyai sebagai Calon Wakil Presiden. Kubu Prabowo-Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf menyebarkan hoaks untuk mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintahan Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang diajukan tim Prabowo-Sandiaga (Factsheet Politik Identitas, Puskapol UI, 2020).

Dampak saling serang melalui isu-isu identitas sebagai salah satu faktor non-elektoral untuk memenangkan simpati dan kontestasi terbukti telah menciptakan kegaduhan dan pertengkaran di dalam masyarakat, baik di dunia digital maupun di kehidupan sehari-hari masyarakat. Hasilnya, terdapat banyak kasus di mana keluarga atau tetangga terlibat pertengkaran karena perbedaan dukungan dan pilihan politik. Penyebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan kemudian memengaruhi persepsi dan perilaku elektoral dari masing-masing kubu ini akhirnya mengarahkan masyarakat Indonesia pada situasi keterbelahan (polarisasi) sosial-politik di berbagai daerah.

Pemilu, yang pada dasarnya merupakan panggung konflik politik untuk merebut kekuasaan, dirancang sedemikian rupa untuk berjalan dengan tertib dan damai. Namun, dengan semakin meningkatnya pengerasan dan eskalasi isu-isu identitas, konflik Pemilu menjadi sulit untuk dikelola dan dikendalikan. Ini terjadi karena adanya faktor non-elektoral, yaitu identitas primordial yang dianggap sebagai gangguan dan serangan yang harus dihadapi oleh masing-masing kubu pendukung.

### **Polarisasi, Pembelahan yang Membahayakan**

Dalam kerangka demokrasi yang menghargai keragaman dan kebebasan, polarisasi dianggap sebagai keniscayaan. Fenomena ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam konteks kontestasi elektoral. Sebagaimana diungkapkan oleh James Q. Wilson (Testriono, 2018), komitmen yang kuat terhadap kandidat dapat menjadi salah satu penyebab mudahnya masyarakat terpolar ke dalam dua kutub politik yang berseberangan.

Polarisasi juga dapat dipicu oleh faktor-faktor lain, seperti ideologi dan respons publik terhadap isu atau kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti Amerika Serikat dan Inggris, polarisasi muncul dan bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama karena adanya perbedaan ideologi yang berimplikasi pada kebijakan pemerintah yang menang dalam kontestasi pemilu. Polarisasi di Amerika, antara kubu konservatif yang diwakili oleh Partai Republik dan kubu liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat, serta di Inggris, yang membelah elit dan massa ke dalam spektrum kanan-kiri dengan representasi politik dari Partai Konservatif dan Partai Buruh, menunjukkan bahwa polarisasi merupakan fenomena sosiopolitik, bukan bagian dari teknis pemilu. Oleh karena itu, polarisasi dapat muncul dan berkembang di luar konteks perhelatan pemilu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

Di Indonesia, gejala polarisasi, yang diartikan sebagai terbelahnya masyarakat secara politik ke dalam dua kutub yang berseberangan secara tajam, mulai muncul menjelang dan menyertai perhelatan Pemilu. Gejala ini pertama kali muncul secara masif pada Pemilu 2014 dan terus bertahan pasca pemilu tersebut. Peningkatan gejala polarisasi terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 dan semakin meningkat pada Pemilu 2019 (Warburton, 2021). Menariknya, peta polarisasi ini melibatkan dua kelompok massa yang terlibat dalam ketiga peristiwa elektoral tersebut, meskipun Pilkada DKI merupakan pemilu lokal.

Dua kelompok massa ini melibatkan kelompok Islam Modernis dan Fundamental (Aspinal, 2019), yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014 dan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019 di satu kubu, serta kelompok Islam Tradisional dan Nasionalis, termasuk non-Muslim, yang mendukung Jokowi-Kalla pada Pemilu 2014 dan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019 di kubu yang lain. Dalam Pilkada DKI 2017, kelompok pendukung Prabowo berada di belakang Anis-Sandiaga, sementara kelompok pendukung Jokowi menjadi penyokong AhokDjarot.

Sejumlah tanda fenomenologis polarisasi ini muncul dalam berbagai stigmatika sosiopolitik yang mengandung ejekan, tuduhan, dan serangan terhadap masing-masing kubu. Misalnya, istilah "radikal," "antek-antek Cendana," "Kampret," dan terakhir "Kadrun" yang disematkan kepada pendukung Prabowo, Sandiaga, dan Anis; dan istilah "anti-Islam,"

"komunis," "antek-antek China," dan "Cebong" untuk pendukung Jokowi, Ma'ruf, dan Ahok. Gejala polarisasi seperti yang diuraikan di atas tentu saja tidak sehat dilihat dari sisi manapun. Pembelahan sosiopolitik yang demikian, jika terus berlangsung, dapat menjadi sangat berbahaya bagi kelangsungan persatuan dan keutuhan negara-bangsa. Pada saat yang sama, konsolidasi demokrasi yang sulit diperoleh akan kehilangan makna substantifnya.

Perhelatan politik elektoral yang seharusnya menjadi arena kontestasi gagasan dan kandidat-kandidat pemimpin bangsa hanya akan menjadi ajang untuk saling menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara elemen-elemen bangsa. Dalam kerangka ini, seruan dan upaya menjelang Pemilu 2024 perlu terus dilakukan oleh semua pihak.

### **Infodemi Elektoral, Wabah Ganas Demokrasi**

Infodemi elektoral, seperti yang dijelaskan dalam teks, menggambarkan penyebaran informasi berlebihan dan seringkali tidak akurat terkait dengan proses pemilihan umum atau kegiatan politik. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk media dan platform, dengan banyak konten yang bersifat hoax, fake news, kampanye hitam, hate speech, dan fitnah. Infodemi ini menjadi semakin signifikan menjelang dan selama periode pemilihan umum.

Pada Pemilu 2019, contoh-contoh infodemi elektoral mencakup sejumlah konten hoax yang menyebar di media sosial dan situs berita palsu. Isu-isu sensitif seperti isu etnis, politik, dan agama digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, menyebabkan ketidakpastian, dan memengaruhi persepsi publik.

Menjelang Pemilu 2024, infodemi elektoral terus berlanjut dengan munculnya konten-konten baru yang memuat isu-isu baru atau mengaitkannya dengan isu-isu lama. Contoh-contoh hoax politik yang disebutkan dalam teks, seperti isu terkait cuti bersama, tentara China masuk Indonesia, atau klaim nonaktifkan KPK, menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap informasi yang tidak terverifikasi.

Faktor-faktor yang memperparah infodemi elektoral meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, penyebaran cepat melalui media sosial, dan kurangnya verifikasi kebenaran informasi sebelum disebarkan. Infodemi ini dapat memiliki dampak serius, seperti memicu konflik, memperparah polarisasi masyarakat, dan mengubah persepsi publik terhadap kandidat atau partai politik.

Upaya untuk menanggulangi infodemi elektoral melibatkan peran aktif dari pihak berwenang, media, dan masyarakat. Pendidikan literasi media dan digital, peningkatan transparansi, serta penegakan regulasi terkait kampanye politik online dapat membantu mengurangi dampak negatif infodemi elektoral. Selain itu, peran masyarakat dalam menyaring dan membagikan informasi yang benar juga krusial untuk menjaga integritas proses demokrasi.

### **Buzzer, Pemicu Kegaduhan**

Peran buzzer atau pasukan cyber dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) dan bagaimana keberadaan mereka dapat menjadi faktor non-elektoral yang memicu konflik. Berikut beberapa poin kunci yang dapat diambil dari teks tersebut:

1. Peran Buzzer dalam Kampanye dan Pencitraan: Buzzer awalnya direncanakan sebagai instrumen untuk membangun citra positif para kandidat. Mereka merupakan jaringan individu yang terdiri dari pendukung, influencer, koordinator, dan pembuat konten, bekerja sama untuk memanipulasi opini publik di media sosial.
2. Penyebaran Black Campaign dan Hoax: Meskipun sejatinya disiapkan untuk membangun branding positif, para buzzer sering kali menjadi pelaku penyebaran black campaign terhadap lawan politik. Mereka menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat merusak reputasi lawan politik.
3. Struktur dan Pembayaran Buzzer: Buzzer dapat bekerja dalam struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan dibayar. Ada juga buzzer yang bekerja sebagai voluntir, terutama yang memiliki kecocokan ideologis dengan figur kandidat yang mereka dukung.
4. Bahaya Keberadaan Buzzer: Buzzer dianggap berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi jika mereka memanfaatkan berita palsu atau ujaran kebencian untuk membangun persepsi atau sudut pandang tertentu terhadap kandidat politik. Cara kerja mereka dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.
5. Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019: Teks mengacu pada pengalaman sebelumnya, yaitu Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019, di mana buzzer telah terlibat dalam penyebaran konten negatif dan provokatif.
6. Ancaman pada Pemilu 2024: Seiring dengan mendekatnya Pemilu 2024, perhatian terhadap potensi bahaya kehadiran buzzer semakin meningkat. Bawaslu RI diharapkan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menindak buzzer yang dapat merusak pesta demokrasi.



7. Kritik terhadap Peran Buzzer: Buzzer dinilai sebagai sosok yang lebih banyak menciptakan kegaduhan, memprovokasi perpecahan, mendorong pertengkaran, dan akhirnya menciptakan konflik Pemilu, baik dalam bentuk horizontal maupun vertikal.
8. Pentingnya Literasi Digital dan Pengawasan: Faktor ini menekankan perlunya literasi digital yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pengawasan ketat terhadap kegiatan buzzer untuk menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

Dalam konteks ini, memahami peran dan dampak buzzer, serta mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas mereka, menjadi krusial untuk menjaga integritas pemilihan umum dan mencegah terjadinya konflik.

## KESIMPULAN

Pertama, Pemilu 2024 diperkirakan akan kembali diwarnai oleh sejumlah faktor non-elektoral. Faktor-faktor non-elektoral yang dimaksud meliputi politik identitas, polarisasi politik, infodemi elektoral, dan perilaku buzzer. Faktor-faktor non-elektoral ini merupakan sisa-sisa dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang hingga saat ini belum dapat sepenuhnya dihilangkan. Kedua, faktor-faktor non-elektoral tersebut dapat dengan mudah memicu kegaduhan di ruang digital, bahkan hingga melahirkan pertengkaran dan konflik Pemilu 2024. Konflik tersebut dapat berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Ketiga, untuk mencegah pengaruh negatif dari keempat faktor non-elektoral tersebut terhadap proses dan hasil Pemilu 2024, diperlukan langkah-langkah antisipasi bersama dan terencana dari para pemangku kepentingan pemilu, terutama peserta pemilu dan pendukungnya, baik dalam konteks Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keempat, peserta pemilu, terutama dalam kontestasi Pilpres, perlu berkomitmen untuk tidak menggunakan identitas-identitas primordial sebagai alat politik dan membatasi penggunaan buzzer sebagai alat pemenangan pemilu. Kelima, Bawaslu dan Gakkumdu diharapkan bekerja secara profesional, tegas, dan tidak pandang bulu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran yang dapat ditimbulkan oleh keempat faktor non-elektoral tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, dan Asep Aji Pramayoga. 2019. "Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial". *Jurnal Pikom*, Volume 20 Nomor 2.
- Ardipandanto, Aryojati. 2020. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme". *Jurnal Politica*, Volume 11 Nomor 1.
- Assyaukanie, Luthfi. 2022. "Polarisasi dan Merosotnya Demokrasi". *Media Indonesia*, 2 Agustus.
- Felicia, L. R. (2019). "Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter". *Koneksi*, 2(2), 352.
- Gustomy, Rachmad. 2020. "Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter". *Jurnal JIIP*, Volume 5 Nomor 2.
- Haboddin, Muhtar. 2012. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal". *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1.
- Harrison, L. (2016). *Metodologi penelitian politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Juditha, Christiany. 2019. "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*.
- Karim, Abdul Gafar. 2019. "Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset". *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10 Nomor 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 2022. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota

- DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Muhtadi, Burhanudin. 2021. “Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik”, *Media Indonesia*, 6 September.
- Mubarok, Husni. 2018. “Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia”. *Jurnal BIMAS ISLAM*, Volume 11 Nomor 2.
- Mustika, Rieka. 2019. “Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial”. *Jurnal Diakom*, Volume 2 Nomor 2.
- Nasrudin, Juhana. 2018. “Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)”. *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 1 Nomor 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syahputra, Iswandi. 2016. “Buzzer dan Demokrasi”. *Republika.co.id*, 29 September.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), hal. 457.
- Tapsell, Ross. 2019. “Pemilu 2019: Polarisasi Medsos atau Ideologis?”. *Tirto.id*, 4 April.
- Tempo.Co*, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta”, 26 Desember 2017)
- Tempo.Co*, “Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga”, 25 Februari 2017
- Saputro, A. (2018). Agama dan Negara: politik identitas menuju Pilpres 2019. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 2(2).
- Wahyuni, Hermin Indah. 2020. “Infodemi: Gagalnya Komunikasi di Masa Pandemi”.  
*BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*. Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020.
- World Health Organization, 2022. “Infodemic”. <https://www.who.int/> infode.